



PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020

*DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANGANDARAN*



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

JL. Kidang Pananjung No. 3 Telp./Fax. (0265) 631156 Pangandaran 46396

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR : 050/Kpts.19.3-Disparbud/2020

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2020

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2021, dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, perlu disusun dokumen Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025;
19. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44);
20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 54 Tahun 2016 Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
21. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34.a Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran sebagaimana Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2021.

KEEMPAT : Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2021 meliputi:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
- b. BAB II : RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SKPD
Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKT SKPD tahun lalu (n-1) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD tahun yang akan datang (n+1) yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang diusung.
- c. BAB III : PENUTUP

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada tanggal : 24 Agustus 2020

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Pangandaran



UNTUNG SAEFUL R., S.Sos., M.Si.

Pembina, IV/a

NIP. 19721108 200312 1 004

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 dapat tersusun. Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman dan pengendali pembangunan daerah di bidang pengawasan atau sebagai arah dalam pencapaian visi dan misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional.

Perubahan Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Tahun 2016-2021 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2016-2021 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran yang memuat visi dan misi serta tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.

Sudah barang tentu penyusunan Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan / penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Pangandaran, 24 Agustus 2020

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Pangandaran



UNTUNG SAEFUL R., S.Sos., M.Si.

Pembina, IV/a

NIP. 19721108 200312 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2019	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra	5
2.2 Analisis Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.....	6
BAB III PENUTUP	16
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Tahun 2020 merupakan tahun ketiga dalam periode RPJMD Kabupaten Pangandaran dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 –2021 sehingga Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2020 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD dan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Program dan Kegiatan yang ada di dalam Renja harus tercantum dalam Renstra yang selanjutnya menjadi dasar/pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dimulai dengan usulan kegiatan yang diajukan oleh Bidang masing - masing disesuaikan dengan kebutuhan riil yang ada, kemudian usulan kegiatan tersebut dirangkum menjadi Rancangan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan disepakati dan diolah serta diajukan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA). Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan bersifat strategis karena berfungsi menjembatani perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan strategis jangka pendek. Dengan demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan berperan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah (RENSTRA) dengan perencanaan strategis jangka pendek (RKT) Perubahan. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Dinas Sosial Kota Depok untuk mencapainya.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi

- Jawa Barat Tahun 2005 - 2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
 16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025.
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025;
 19. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44);
 20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 54 Tahun 2016 Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 21. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34.a Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan jawab Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2020 sebagai landasan atau pedoman dalam melaksanakan tugas, pokok dan tata kerja yang diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai landasan operasional guna melaksanakan berbagai program dan kegiatan, sehingga sesuai dengan rencana capaian kinerja untuk seluruh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), indikator kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Terealisasinya target dalam indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana

keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran, pencapaian indikator kinerja dalam Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama.

1.4 Sistematika Penulisan

Substansi yang tercakup dalam RKT Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

- 4.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
- 4.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
- 4.3 Tabel rencana program dan kegiatan

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2019

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANGANDARAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra

Capaian Renstra Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Table 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2019	Realisas Tahun 2019	Capaian Kinerja (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Yang Baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	B (61)	BB (84,72)	138.89	Sangat Baik
2	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Lokal	Persentase Pemajuan Kebudayaan Lokal	35%	50%	142.86	Sangat Baik
3	Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif	30%	39,58%	131.93	Sangat Baik
4	Meningkatnya Pengembangan Kepariwisata	Jumlah PAD Dari Sektor Pariwisata	25 Milyar	18,472,858,000	73.89	Sedang
5	Berkembangnya Destinasi Wisata untuk Memperoleh Pengakuan GSTC	Prosentase Pemenuhan Kriteria GSTC-D Sektor Pariwisata	60%	63,41%	105.68	Sangat Baik

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2019

Dari table di atas terdapat 5 sasaran dengan 5 indikator, pada tahun 2019 ada 4 indikator yang masuk ke dalam kategori sangat baik dan 1 indikator yang masuk ke dalam kategori sedang. Capaian kinerja tertinggi adalah indikator objek pemajuan kebudayaan sebesar 142,86% dan capaian kinerja terendah adalah indikator jumlah PAD dari sector pariwisata sebesar 73,89%.

2.2 Analisis Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

2.2.1 Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal merupakan analisis yang dilakukan terhadap faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan yang ada di ruang lingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada kondisi terkini. Adapun kekuatan dan kelemahan yang teridentifikasi sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strengths)

1. Peningkatan status kelembagaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan SOTK yang ada

b. Kelemahan (Weakness)

Terbatasnya jumlah PNS yang belum dapat ditambah jumlahnya terkait kebutuhan.

2.2.2 Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis Lingkungan Eksternal merupakan analisis yang dilakukan terhadap faktor-faktor yang berada di luar lingkup kepegawaian pada kondisi terkini yang terdiri dari Peluang dan Tantangan. Adapun Peluang dan Tantangan dimaksud sebagai berikut:

a. Peluang (Opportunities)

1. Kebijakan Pemerintah dalam untuk mewujudkan Pangandaran sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
2. banyaknya pembangunan di destinasi wisata.

b. Tantangan (Threats)

1. Pembuatan Promosi Pariwisata untuk bisa bersaing dengan kabupaten/kota lainnya
2. Sulitnya Mengedukasi Pedagang untuk menjaga kebersihan di area pantai.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Isu mengenai Dinas pariwisata dan kebudayaan yang mengemuka sampai saat ini dalam pelayanan wisata adalah sarana dan prasarana yang kurang mendukung serta integritas dan kebersihan di area pantai belum sesuai dengan kondisi yang diinginkan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan masih banyak dihadapkan pada berbagai kendala dan permasalahan baik dari internal maupun eksternal. Berbagai masalah tersebut

akan terus diatasi melalui berbagai upaya program dan kegiatan serta optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dalam kerangka itu, ada beberapa isu yang akan menjadi agenda penting Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ke depan, yaitu:

Isu-isu di bidang Sosial, diantaranya :

1. Penataan di Tempat wisata
2. Sarana prasarana di tempat wisata perlu ditingkatkan;
3. Belum adanya sosialisasi tentang tata cara pembuatan TDUP terbaru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektrik.;
4. Belum adanya data potensi daya tarik Desa Wisata yang ada di Kab. Pangandaran.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Depok merupakan penjabaran pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2019-2021 dan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran 2020.

Adapun hasil Penelaahan rancangan awal RKPD terdapat beberapa kegiatan yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Hal tersebut terkait dengan pencapaian program dan kegiatan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Untuk lebih jelasnya telaahan rencana kerja dalam RKPD dapat dilihat pada tabel review terhadap rancangan awal (Tabel 2.4)

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Sasaran Renstra	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Keterangan
Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yg baik	Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran yang diberikan	80%	
		1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Jumlah Rekening Yang di	34 rekening	

		dan Listrik	Bayar		
	2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan Perkantoran	4 orang	
	3	Penyediaan Jasa Tenaga Pengemudi	Jumlah tenaga sopir untuk mendukung mobilitas pejabat eselon 2 dan eselon 3	1 orang	
	4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK yang dibeli	40 Jenis	
	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang digandakan	19.800 Lembar	
	6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	60 kali	
	7	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah makanan dan minuman yang dibeli	900 dus	
	8	Penyediaan Jasa Operator Aplikasi	Jumlah operator aplikasi	4 Orang	
	9	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah petugas keamanan kantor	2 orang	
	10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan yang di Bayarkan	16 Unit	

		Dinas/Operasional	Pajak Tahunan		
	11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik yang dibeli	5 jenis	
	12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jenis bahan bacaan yang dibeli	12 Jenis	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		persentase sarana dan prasarana aparatur yang memiliki kondisi baik	85%	
	1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli	3 jenis	
	2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dibeli	3 Jenis	
	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	5 Unit	
	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	9 Unit	
	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan	Jumlah peralatan gedung kantor yang	5 jenis	

			Gedung Kantor	dipelihara		
		6	Pengadaan Komputer	Jumlah Komputer/Laptop yang dibeli	4 Unit	
		7	Pengadaan Alat-alat studio	Jumlah alat studio yang dibeli	0 Unit	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	85%	
		1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang berhasil disusun	19 dokumen	
		2	Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan program dan kegiatan SKPD yang disusun	2 dokumen	
		3	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah operator yang mengelola Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	2 Orang	
		4	Penyelenggaraan Pengelolaan	Jumlah operator	2 Orang	

			Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah	yang mengelola sistem informasi pengelolaan barang daerah		
		5	Penyelenggaraa n Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah operator pengelola sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah	2 Orang	
		6	Penyelenggaraa n Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Daerah	Jumlah operator pengelola sistem informasi perencanaan daerah	2 Orang	
		7	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun	1 Dokumen	
		8	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mengikuti program peningkatan kapasitas pendukung tugas dan fungsi	0%	

		1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	0 Orang	
Meningkatnya pengembangan kepariwisataan	Jumlah PAD sektor Pariwisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		Persentase peningkatan Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara dan mancanegara	10%	
		1	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri	Jumlah event promosi yang diikuti	3 Event	
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		Persentase Destinasi pariwisata yang dikembangkan	15%	
		1	Pengembangan Daya tarik Wisata Kota dan Desa	Jumlah Destinasi Wisata Kota dan Desa yang dikembangkan	0 Destinasi Wisata	
		2	Pengembangan Daya tarik Wisata Alam	Jumlah Destinasi Wisata Alam yang dikembangkan	0 Destinasi Wisata	

		3	Pemberdayaan SDM Pariwisata	jumlah masyarakat di destinasi wisata yang ikut terlibat dalam pengembangan kepariwisataan	0 Orang	
		4	Pelayanan Retribusi Pariwisata	Jumlah destinasi wisata yang memiliki pelayanan pariwisata terpadu	5 objek wisata	
		5	Pelayanan Sapta Pesona Pariwisata	Jumlah destinasi yang memberikan pelayanan Sapta Pesona	5 Destinasi Wisata	
		7	Pelayanan Keselamatan Wisata Tirta	Jumlah destinasi wisata yang mengembangkan strategi peningkatan kepuasan pengunjung	5 destinasi	
		8	Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana Destinasi Wisata	Jumlah destinasi wisata yang mendapat peningkatan fasilitas sarana dan prasarana	1 Lokasi	
		9	Pemeliharaan Fasilitas Sarana Prasarana Destinasi Wisata (DAK)	Jumlah Destinasi Wisata yang mendapat pemeliharaan fasilitas	1 Lokasi	

				sarana dan prasarana		
		10	Penataan Kawasan Pantai Karapyak (19)	Jumlah destinasi wisata alam yang ditata	1 Destinasi	
		11	Pengembangan Destinasi Wisata (Penataan Kawasan Pantai Barat Dan Timur Pangandaran) (Desa Pangandaran dan Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, Kel.PANGANDARAN, Kec.PANGANDARAN, Kab.Pangandaran) (Banprov)	Jumlah destinasi wisata yang ditata	1 Lokasi	
		12	Pengembangan Destinasi Wisata (Penataan Kawasan Pantai Barat Dan Timur Pangandaran) (Desa Pangandaran dan Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, Kel.PANGANDARAN, Kec.PANGANDARAN, Kab.Pangandara	Jumlah Pintu Tol Gate yang Direvitalisasi	1 Lokasi	

			n) (Banprov)			
		13	Pengembangan Destinasi Wisata (Revitalisasi Pintu TOL Gate Utama Pangandaran Kecamatan Pangandaran) (Desa Pangandaran dan Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, Kel.PANGANDARAN, Kec.PANGANDARAN, Kab.Pangandaran) (Banprov)	Jumlah Pintu Tol Gate yang Direvitalisasi	1 Lokasi	
		14	Pengembangan Destinasi Wisata (Revitalisasi Pintu TOL Gate Bulak Cikembulan Kecamatan Sidamulih) (Desa Cikembulan, Kel.CIKEMBULAN, Kec.SIDAMULIH, Kab.Pangandaran) (Banprov)	Jumlah Pintu Tol Gate yang Direvitalisasi	1 Lokasi	
		15	Pengembangan Destinasi Wisata (Revitalisasi Pintu TOL Gate Timur Pangandaran Kecamatan Pangandaran) (Jumlah Pintu Tol Gate yang Direvitalisasi	1 Lokasi	

			Desa Pangandaran dan Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, Kel.PANGANDARAN, Kec.PANGANDARAN, Kab.Pangandaran) (Banprov)			
		16	Pengembangan Destinasi Wisata (Revitalisasi Pintu TOL Gate Karapyak Kecamatan Kalipucang) (Desa Bagolo, Kel.BAGOLO, Kec.KALIPUCANG, Kab.Pangandaran (Banprov)	Jumlah Pintu Tol Gate yang Direvitalisasi	1 Lokasi	
		17	Pengembangan Destinasi Wisata (Revitalisasi Pintu TOL Gate Utama Batuhui Kecamatan Parigi) (Desa Ciliang, Kel.CILIANG, Kec.PARIGI, Kab.Pangandaran) (Banprov)	Jumlah Pintu Tol Gate yang Direvitalisasi	1 Lokasi	
		18	Pengembangan Destinasi Wisata (Revitalisasi Pintu TOL Gate Bulak Batuhui Kecamatan Parigi) (Desa	Jumlah Pintu Tol Gate yang Direvitalisasi	1 Lokasi	

			Ciliang, Kel.CILIANg, Kec.PARIGI, Kab.Pangandara n) (Banprov)			
		19	Pengembangan Destinasi Wisata (Revitalisasi Pintu TOL Gate Batukaras Kecamatan Cijulang) (Desa Batukaras, Kel.BATUKARAS, Kec.CIJULANG, Kab.Pangandara n) (Banprov)	Jumlah Pintu Tol Gate yang Direvitalisasi	1 Lokasi	
		20	Peningkatan Pelayanan Keparawisataan Pada Masa Pandemi Covid - 19	Jumlah Destinasi Wisata Yang Mengemban gkan Kepuasan Pengunjung Pada Masa Pandemi Covid-19	5 Destinas i Wisata	
		21	Peningkatan Infrastruktur IT AKB	Jumlah Destinasi Yang Memiliki Infrastuktur Pendukung AKB	1 Destinas i	
		Program Pengembangan Kemitraan		Persentase peningkatan kerjasama pengembang an pariwisata	10%	
		1	Pembinaan organisasi kepariwisataan	Jumlah organisasi masyarakat yang bergerak di	2 Organis asi	

				bidang pariwisata yang dibina		
Berkembangnya destinasi wisata untuk memperoleh pengakuan GSTC-D	Prosentase pemenuhan indikator GSTC-D	Program Pengembangan pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan		Persentase SDM pengelola yang memahami prinsip-prinsip pengembangan pariwisata berkelanjutan	80%	
		1	Pembentukan Tim Koordinasi persiapan Penilaian GSTC-D	jumlah destinasi wisata yang dinilai oleh GSTC-D	1 Destinasi	
		2	Peningkatan pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	Jumlah SDM Pengelola Destinasi yang dibina	0 Orang	
		3	Pembuatan media promosi	Jenis Media Promosi	1 Jenis	
		4	Penyelenggaraan event kreatif di musim sepi kunjungan	Persentase peningkatan kunjungan wisata di musim sepi kunjungan	0%	
		5	Penyelenggaraan event pariwisata dimusim sepi kunjungan	Persentase kunjungan wisata pada musim sepi	2%	
		6	Pengembangan tanda daftar usaha pariwisata	Presentasi SDM Pengelola yang Memahami	50%	

			Prinsip-Prinsip Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan		
		7	Peningkatan tata kelola destinasi pariwisata	Jumlah destinasi wisata yang memiliki tata kelola destinasi yang baik	5 destinasi
		8	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana aparatur (akses untuk semua)	Jumlah destinasi GSTC yang memiliki sarana dan prasarana wisata yang mengakomodasi keperluan penyandang disabilitas	5 destinasi
		9	Penyusunan Database kepariwisataan	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah Yang dibuat	0 Dokumen
		10	Analisa kepuasan wisatawan	Prosentase penyusunan dokumen pelaporan mengenai data kepuasan pengunjung kepada publik yang disusun	45%
		11	Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan	Jumlah destinasi wisata yang mengemban	0 destinasi

				gkan strategi peningkatan kepuasan pengunjung		
		12	Penyusunan Peraturan Daerah Desa Wisata	Jumlah dokumen database kepariwisataan termasuk situs alam dan budaya yang akurat dan termutakhirkan	1 Dokumen	
Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif	persentase pengembangan ekonomi kreatif	Program pengembangan ekonomi pariwisata		persentase masyarakat sekitar destinasi wisata yang memperoleh manfaat ekonomi dari pengembangan pariwisata	80%	
		1	Pembinaan SDM Kepariwisataan	Jumlah pelaku pariwisata yang memperoleh pembinaan SDM kepariwisataan	0 orang	
		2	Peningkatan Kapasitas Bagi Para Pelaku Pariwisata (DAK Non Fisik)	Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata yang Mendapatkan Pelatihan	130 orang	
		Program pengembangan		persentase peningkatan	30%	

		industri kreatif	jumlah wirausaha baru bidang ekonomi kreatif			
		1	Pembinaan pelaku usaha kreatif	jumlah pelaku usaha kreatif yang mendapat pembinaan	15 orang	
		2	pengembangan investasi industri kreatif	jumlah usaha kreatif yang mendapatkan fasilitas permodalan	1 usaha kreatif	
Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan lokal	Prosentase Pemajuan Kebudayaan lokal	Program Perlindungan Kebudayaan lokal		Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi	60%	
		1	Pengembangan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu	Jumlah dokumen database objek pemajuan kebudayaan yang Termutakhirkan	1 Dokumen	
		Program Pengembangan Kebudayaan Lokal		Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	50%	
		1	Pengayaan Keberagaman Kebudayaan Lokal	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang ditingkatkan pengayaan keberagama	1 Objek	

			nnya		
		2	Kajian Kebudayaan Lokal	Jumlah dokumen kajian yang disusun	1 Dokumen
		Program Pemanfaatan Kebudayaan Lokal		Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan	70%
		1	Internalisasi Nilai Budaya	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang diinternalisasi	0 Objek
		2	Penguatan Identitas Kebudayaan Lokal	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang mempertahankan pakem	0 Objek
		3	Kolaborasi Kebudayaan Lokal	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikolaborasikan	0 Objek
		4	Pengolahan Produk Budaya Lokal	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang diolah Menjadi Produk	0 Produk
		5	Penyelenggaraan Event Budaya	Jumlah kunjungan wisatawan	1.500.000 Orang
		6	Pengembangan Inovasi Kebudayaan	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang	1 objek

			Lokal	terinovasi		
		7	Diplomasi Kebudayaan	Jumlah Diplomasi Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan	10 Diploma si	
		8	Peningkatan kerjasama Kebudayaan	jumlah pihak yang menjalin kerjasama kebudayaan	2 Pihak	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Melalui hasil evaluasi terhadap pelaksanaan visi dan misi Kabupaten yang menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis jawab Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2018-2021, maka tujuan pelaksanaan Renja adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yg baik
2. Memajukan Kebudayaan Lokal
3. Meningkatkan pengembangan kepariwisataan
4. Meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif
5. Mengembangkan destinasi wisata untuk memperoleh pengakuan GSTC-D

Sedangkan sasarannya adalah :

1. Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yg baik
2. Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan lokal
3. Meningkatnya pengembangan kepariwisataan
4. Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif
5. Berkembangnya destinasi wisata untuk memperoleh pengakuan GSTC-D

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mencapai sasaran tersebut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupeten Pangandaran telah menetapkan indikator sasaran dan target kinerja sasaran Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan target BB
2. Prosentase Pemajuan Kebudayaan lokal dengan target 80%
3. Jumlah PAD sektor Pariwisata dengan target 3 M
4. persentase pengembangan ekonomi kreatif dengan target 70%
5. Prosentase pemenuhan indikator GSTC-D dengan target 100%

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi dan Kebijakan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani.	Mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yg baik	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yg baik	Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)
Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan lokal	Memajukan Kebudayaan Lokal	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan perlindungan dan kelestarian kebudayaan lokal 2. Meningkatkan pengembangan kebudayaan lokal 3. Meningkatkan pemanfaatan kebudayaan lokal
Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan	Meningkatkan pengembangan kepariwisataan	Meningkatnya pengembangan kepariwisataan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata 2. Mengembangkan pemasaran pariwisata 3. Mengembangkan kemitraan dan kelembagaan pariwisata
	Meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif	Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kreatifitas pelaku usaha ekonomi kreatif
	Mengembangkan destinasi wisata untuk memperoleh pengakuan GSTC-D	Berkembangnya destinasi wisata untuk memperoleh pengakuan GSTC-D	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran disusun sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagunya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Berdasarkan pemahaman ini, maka disusun rencana Kabupaten Pangandaran yaitu :

1. Nilai AKIP dengan target B
2. Prosentase Pemajuan Kebudayaan lokal dengan target 70%
3. Jumlah kunjungan wisata dengan target 5,5 M
4. Persentase pertumbuhan PDRB dengan target 10%
5. Jumlah destinasi wisata yang memperoleh pengakuan dari Global Sustainable Tourist Council (GSTC) dengan target 0%

Pada kebijakan umum pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2021 terdapat program pembangunan yang terkait dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Indikator Kinerja Sasaran terpilih dan target tahun 2020 sebagai berikut:

1. Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan target BB
2. Prosentase Pemajuan Kebudayaan lokal dengan target 70%
3. Jumlah PAD sektor Pariwisata dengan target 27,5 M
4. persentase pengembangan ekonomi kreatif dengan target 50%
5. Prosentase pemenuhan indikator GSTC-D dengan target 80%

TABEL 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TAHUN			
				2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani							
1	Mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yg baik	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yg baik	Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	CC	B	BB	BB
Misi 4 : Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan lokal							
2	Memajukan Kebudayaan Lokal	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan lokal	Prosentase Pemajuan Kebudayaan lokal	25%	35%	70%	80%
Misi 6 : Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan							
3	Meningkatkan pengembangan kepariwisataan	Meningkatnya pengembangan kepariwisataan	Jumlah PAD sektor Pariwisata	25 M	25 M	27,5 M	30 M
4	Meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif	Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif	persentase pengembangan ekonomi kreatif	20%	30%	50%	70%
5	Mengembangkan destinasi wisata untuk memperoleh pengakuan GSTC-D	Berkembangnya destinasi wisata untuk memperoleh pengakuan GSTC-D	Prosentase pemenuhan indikator GSTC-D	40%	60%	80%	100%

4.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Dalam upaya merealisasikan tujuan dan sasaran didukung oleh program dan kegiatan yang pada rencana perubahan anggaran 2020, dari 13 program akan dilaksanakan menjadi 76 kegiatan dengan target kinerja program dan kegiatan sebagaimana yang dilaksanakan pada Perubahan Renja tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Program Utama

1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan 19 kegiatan
2. Program Pengembangan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dengan 12 kegiatan
3. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan 1 kegiatan
4. Program Pengembangan Kemitraan dengan 1 kegiatan
5. Program Pengembangan Ekonomi Pariwisata dengan 2 kegiatan
6. Program pengembangan industri kreatif dengan 2 kegiatan
7. Program Perlindungan Kebudayaan Lokal dengan 1 kegiatan
8. Program Pengembangan Kebudayaan Lokal dengan 2 kegiatan
9. Program Pemanfaatan Kebudayaan Lokal dengan 8 kegiatan

kegiatan Program Penunjang

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 12 kegiatan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 7 kegiatan
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan 1 kegiatan
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan 8 kegiatan

Anggaran untuk Perubahan tahun 2020 dengan pagu indikatif sebesar Rp. 19.900.049.071 (sembilan belas milyar sembilan ratus juta empat puluh sembilantujuh puluh satu rupiah).

Adapun program yang terpilih untuk dilaksanakan pada Anggaran Perubahan tahun 2020 adalah sebanyak 13 (tiga belas) program yang terdiri dari

1. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran dengan pagu indikatif sebesar Rp. 765.820.343,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan pagu indikatif menjadi Rp. 323.739.943,-
5. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan pagu sebesar Rp. 179.472.500,-
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan pagu indikatif sebesar Rp. 0.-
7. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan pagu sebesar Rp

16.323.399.971,-

8. Program Pengembangan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dengan pagu sebesar Rp 1.082.900.014,-
9. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan pagu sebesar Rp. 1.150.000,-
10. Program Pengembangan Kemitraan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 80.000.000,-
11. Program Pengembangan Ekonomi Pariwisata dengan pagu indikatif sebesar Rp. 344.050.000,-
12. Program pengembangan industri kreatif dengan pagu indikatif sebesar Rp. 36.117.500,-
13. Program Perlindungan Kebudayaan Lokal dengan pagu indikatif sebesar Rp. 34.800.000,-
14. Program Pengembangan Kebudayaan Lokal dengan pagu indikatif sebesar Rp. 125.318.800,-
15. Program Pemanfaatan Kebudayaan Lokal dengan pagu indikatif sebesar Rp. 598.280.000,-

4.3 Tabel rencana program dan kegiatan

Uraian Kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4.2.

Tabel. 4.2.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (P-RENJA) TAHUN 2020

No	SKPD/ Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Target Kinerja		Pagu Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
2084	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN					15.912.422.970	19.900.049.071	3.987.626.101	
2085	URUSAN PARIWISATA					13.880.622.970	19.141.650.271	5.261.027.301	
2086	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran yang diberikan		80%	80%	1.142.882.002	765.820.343	(377.061.659)	
2087	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Yang di Bayar	Jumlah Rekening Yang di Bayar	24 rekening	34 rekening	275.000.000	244.096.597	(30.903.403)	APBD Kabupa ten
2088	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan Perkantoran	Jumlah tenaga kebersihan Perkantoran	4 orang	4 orang	82.500.000	73.561.300	(8.938.700)	APBD Kabupa ten
2089	Penyediaan Jasa Tenaga Pengemudi	Jumlah tenaga sopir untuk mendukung mobilitas pejabat eselon 2 dan eselon 3	Jumlah tenaga sopir untuk mendukung mobilitas pejabat eselon 2 dan eselon 3	1 orang	1 orang	81.400.000	26.200.000	(55.200.000)	APBD Kabupa ten
2090	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK yang dibeli	Jenis ATK yang dibeli	40 Jenis	40 Jenis	126.500.000	105.325.310	(21.174.690)	APBD Kabupa

									ten
2091	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang digandakan	Jumlah dokumen yang digandakan	25.000 lembar	19.800 Lembar	34.782.002	5.571.114	(29.210.888)	APBD Kabupaten
2092	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	60 kali	60 kali	275.000.000	116.849.522	(158.150.478)	APBD Kabupaten
2093	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah makanan dan minuman yang dibeli	jumlah makanan dan minuman yang dibeli	900 dus	900 dus	60.000.000	74.075.000	14.075.000	APBD Kabupaten
2094	Penyediaan Jasa Operator Aplikasi	Jumlah operator aplikasi	Jumlah operator aplikasi	4 Orang	4 Orang	57.000.000	56.200.000	(800.000)	APBD Kabupaten
2095	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah petugas keamanan kantor	Jumlah petugas keamanan kantor	2 orang	2 orang	40.700.000	34.800.000	(5.900.000)	APBD Kabupaten
2096	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yang di Bayarkan Pajak Tahunan	Jumlah Kendaraan yang di Bayarkan Pajak Tahunan	16 Unit	16 Unit	16.500.000	8.271.500	(8.228.500)	APBD Kabupaten
2097	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran	Jenis komponen instalasi listrik yang dibeli	Jenis komponen instalasi listrik yang dibeli	5 jenis	5 jenis	27.500.000	5.000.000	(22.500.000)	APBD Kabupaten

	gan Bangunan Kantor								
2098	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jenis bahan bacaan yang dibeli	Jenis bahan bacaan yang dibeli	12 Jenis	12 Jenis	66.000.000	15.870.000	(50.130.000)	APBD Kabupaten
2099	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana aparatur yang memiliki kondisi baik		85%	85%	320.500.000	323.739.943	3.239.943	
2100	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	5 jenis	5 jenis	11.000.000	9.245.000	(1.755.000)	APBD Kabupaten
2101	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	Jumlah kendaraan yang dipelihara	10 Unit	9 Unit	110.000.000	73.719.943	(36.280.057)	APBD Kabupaten
2102	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dibeli	Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dibeli	5 Jenis	3 Jenis	60.000.000	91.475.000	31.475.000	APBD Kabupaten
2103	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	5 Unit	5 Unit	16.500.000	10.000.000	(6.500.000)	APBD Kabupaten
2104	Pengadaan Komputer	Jumlah Komputer/Laptop yang dibeli	Jumlah Komputer/Laptop yang dibeli	2 Unit	4 Unit	70.000.000	40.100.000	(29.900.000)	APBD Kabupaten

2105	Pengadaan Alat Studio	Jumlah alat studio yang dibeli	Jumlah alat studio yang dibeli	1 Unit	3 Unit	25.000.000	-	(25.000.000)	APBD Kabupaten
2106	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli	jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli	3 jenis	3 jenis	28.000.000	99.200.000	71.200.000	APBD Kabupaten
2107	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mengikuti program peningkatan kapasitas pendukung tugas dan fungsi		70%	-	110.000.000	-	(110.000.000)	
2108	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	40 Orang	33 Orang	110.000.000	-	(110.000.000)	APBD Kabupaten
2109	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik		85%	85%	251.350.000	179.472.500	(71.877.500)	
2110	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang berhasil disusun	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang berhasil	19 dokumen	19 dokumen	15.750.000	4.085.400	(11.664.600)	APBD Kabupaten

			disusun						
2111	Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan program dan kegiatan SKPD yang disusun	Jumlah Dokumen perencanaan program dan kegiatan SKPD yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	17.600.000	4.387.100	(13.212.900)	APBD Kabupaten
2112	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah operator yang mengelola Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah operator yang mengelola Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	2 Orang	2 Orang	53.000.000	42.000.000	(11.000.000)	APBD Kabupaten
2113	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah	Jumlah operator yang mengelola sistem informasi pengelolaan barang daerah	Jumlah operator yang mengelola sistem informasi pengelolaan barang daerah	2 Orang	2 Orang	53.000.000	42.000.000	(11.000.000)	APBD Kabupaten
2114	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah operator pengelola sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah	Jumlah operator pengelola sistem informasi pengelolaan pendapatan	2 Orang	2 Orang	53.000.000	42.000.000	(11.000.000)	APBD Kabupaten

			daerah						
2115	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Daerah	Jumlah operator pengelola sistem informasi perencanaan daerah	Jumlah operator pengelola sistem informasi perencanaan daerah	2 Orang	2 Orang	53.000.000	42.000.000	(11.000.000)	APBD Kabupaten
2116	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun	2 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	1.500.000	(1.500.000)	APBD Kabupaten
2117	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	1.500.000	(1.500.000)	APBD Kabupaten
2118	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Destinasi pariwisata yang dikembangkan		15%	15%	8.138.182.968	16.328.399.971	8.190.217.003	
2119	Pelayanan Retribusi Pariwisata	Jumlah destinasi wisata yang memiliki pelayanan pariwisata terpadu	Jumlah destinasi wisata yang memiliki pelayanan pariwisata terpadu	5 objek wisata	5 objek wisata	2.475.948.000	2.427.400.000	(48.548.000)	APBD Kabupaten

2120	Pelayanan Sapta Pesona Pariwisata	Jumlah destinasi yang memberikan pelayanan Sapta Pesona	Jumlah destinasi yang memberikan pelayanan Sapta Pesona	5 Destinasi Wisata	5 Destinasi Wisata	270.000.000	215.250.000	(54.750.000)	APBD Kabupaten
2121	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kota dan Desa	Jumlah Destinasi Wisata Kota dan Desa yang dikembangkan	Jumlah Destinasi Wisata Kota dan Desa yang dikembangkan	10 Destinasi Wisata	10 Destinasi Wisata	100.000.000	-	(100.000.000)	APBD Kabupaten
2122	Pengembangan Daya Tarik Wisata Alam	Jumlah Destinasi Wisata Alam yang dikembangkan	Jumlah Destinasi Wisata Alam yang dikembangkan	1 Destinasi	1 Destinasi	100.000.000	-	(100.000.000)	APBD Kabupaten
2123	Pemberdayaan SDM Pariwisata	jumlah masyarakat di destinasi wisata yang ikut terlibat dalam pengembangan kepariwisataan	jumlah masyarakat di destinasi wisata yang ikut terlibat dalam pengembangan kepariwisataan	40 Orang	40 Orang	38.500.000	-	(38.500.000)	APBD Kabupaten
2124	Pelayanan Keselamatan Wisata Tirta	Jumlah destinasi wisata yang mengembangkan strategi peningkatan kepuasan pengunjung	Jumlah destinasi wisata yang mengembangkan strategi peningkatan kepuasan pengunjung	5 destinasi	5 destinasi	1.245.035.968	1.200.230.880	(44.805.088)	APBD Kabupaten

2125	Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana Destinasi Wisata	Jumlah Fasilitas Sarana dan Prasarana destinasi Wisata Yang Ditingkatkan	Jumlah destinasi wisata yang mendapat peningkatan fasilitas sarana dan prasarana	1 Lokasi	1 Lokasi	24.800.000	24.800.000	-	APBD Kabupaten
2126	Pemeliharaan Fasilitas Sarana Prasarana Destinasi Wisata (DAK)	Jumlah destinasi wisata yang mendapat Pemeliharaan Sarana dan Parsarana	Jumlah Destinasi Wisata yang mendapat pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana	1 Lokasi	1 Lokasi	3.883.899.000	3.367.544.000	(516.355.000)	APBN/DAK
2127	Pengembangan Destinasi Wisata (Penataan Kawasan Pantai Barat Dan Timur Pangandaran) (Desa Pangandaran dan Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, Kel.PANGANDARAN, Kec.PANGANDARAN,	-	Jumlah destinasi wisata yang ditata	-	1 Lokasi	-	651.277.000	651.277.000	APBD Provinsi

	Kab.Pangandaran) (Banprov)								
2128	Pengembangan Destinasi Wisata (Revitalisasi Pintu TOL Gate Utama Pangandaran Kecamatan Pangandaran) (Desa Pangandaran dan Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, Kel.PANGANDARAN, Kec.PANGANDARAN, Kab.Pangandaran) (Banprov)	-	Jumlah Pintu Tol Gate yang Direvitalisasi	-	1 Lokasi	-	364.557.500	364.557.500	APBD Provinsi
2129	Pengembangan Destinasi Wisata (Revitalisasi Pintu TOL Gate Bulak	-	Jumlah Pintu Tol Gate yang Direvitalisasi	-	1 Lokasi	-	484.287.500	484.287.500	APBD Provinsi

	Cikembulan Kecamatan Sidamulih) (Desa Cikembulan, Kel.CIKEMBU LAN, Kec.SIDAMUL IH, Kab.Pangandara n) (Banprov)								
2130	Pengembangan Destinasi Wisata (Revitalisasi Pintu TOL Gate Timur Pangandaran Kecamatan Pangandaran) (Desa Pangandaran dan Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, Kel.PANGAND ARAN, Kec.PANGAN DARAN, Kab.Pangandara n) (Banprov)	-	Jumlah Pintu Tol Gate yang Direvitalisasi	-	1 Lokasi	-	308.777.500	308.777.500	APBD Provinsi

2131	Pengembangan Destinasi Wisata (Revitalisasi Pintu TOL Gate Karapyak Kecamatan Kalipucang) (Desa Bagolo, Kel.BAGOLO, Kec.KALIPUCANG, Kab.Pangandaran (Banprov)	-	Jumlah Pintu Tol Gate yang Direvitalisasi	-	1 Lokasi	-	494.452.500	494.452.500	APBD Provinsi
2132	Pengembangan Destinasi Wisata (Revitalisasi Pintu TOL Gate Utama Batuhiu Kecamatan Parigi) (Desa Ciliang, Kel.CILIANG, Kec.PARIGI, Kab.Pangandaran) (Banprov)	-	Jumlah Pintu Tol Gate yang Direvitalisasi	-	1 Lokasi	-	494.452.500	494.452.500	APBD Provinsi
2133	Pengembangan Destinasi Wisata (Revitalisasi Pintu TOL Gate Bulak Batuhiu Kecamatan	-	Jumlah Pintu Tol Gate yang Direvitalisasi	-	1 Lokasi	-	494.452.500	494.452.500	APBD Provinsi

	Parigi) (Desa Ciliang, Kel.CILIANG, Kec.PARIGI, Kab.Pangandaran) (Banprov)								
2134	Pengembangan Destinasi Wisata (Revitalisasi Pintu TOL Gate Batukaras Kecamatan Cijulang) (Desa Batukaras, Kel.BATUKARAS, Kec.CIJULANG, Kab.Pangandaran) (Banprov)	-	Jumlah Pintu Tol Gate yang Direvitalisasi	-	1 Lokasi	-	494.562.500	494.562.500	APBD Provinsi
2135	Penataan Kawasan Pantai Karapyak (19)	-	Jumlah destinasi wisata alam yang ditata	-	1 Destinasi Wisata	-	982.025.591	982.025.591	APBD Kabupaten
2136	Peningkatan Pelayanan Keparawisataan Pada Masa Pandemi Covid-19	-	Jumlah Destinasi Wisata Yang Mengembangkan Kepuasan Pengunjung Pada Masa Pandemi Covid-19	-	5 Destinasi Wisata	-	240.500.000	240.500.000	APBD Kabupaten

2137	Peningkatan Infrastruktur IT AKB	-	Jumlah Destinasi Yang Memiliki Infrastuktur Pendukung AKB	-	1 Destinasi	-	4.083.830.000	4.083.830.000	APBD Kabupaten
2138	Program Pengembangan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	Persentase SDM pengelola yang memahami prinsip-prinsip pengembangan pariwisata berkelanjutan		80%	80%	2.022.700.000	1.082.900.014	(939.799.986)	
2139	Penyusunan Database Kepariwisata	Jumlah dokumen database kepariwisataan termasuk situs alam dan budaya yang akurat dan termutakhirkan	Jumlah dokumen database kepariwisataan termasuk situs alam dan budaya yang akurat dan termutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000	55.517.000	(54.483.000)	APBD Kabupaten
2140	Pembuatan Media Promosi	Jenis Media Promosi	Jenis Media Promosi	2 jenis	1 Jenis	102.500.000	64.600.000	(37.900.000)	APBD Kabupaten
2141	Penyelenggaraan Event Kreatif di Musim Sepi Kunjungan	Persentase peningkatan kunjungan wisata di musim sepi kunjungan	Persentase peningkatan kunjungan wisata di musim sepi kunjungan	1%	-	150.000.000	-	(150.000.000)	APBD Kabupaten
2142	Penyelenggaraan Event Pariwisata di	Persentase kunjungan wisata pada musim sepi	Persentase kunjungan wisata pada	2%	2%	150.000.000	5.287.004	(144.712.996)	APBD Kabupaten

	Musim Sepi Kunjungan		musim sepi						
2143	Pengembangan Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Presentasi SDM Pengelola yang Memahami Prinsip-Prinsip Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan	Presentasi SDM Pengelola yang Memahami Prinsip-Prinsip Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan	50%	50%	50.000.000	38.650.000	(11.350.000)	APBD Kabupaten
2144	Peningkatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi wisata yang memiliki tata kelola destinasi yang baik	Jumlah destinasi wisata yang memiliki tata kelola destinasi yang baik	5 destinasi	5 destinasi	260.000.000	194.243.260	(65.756.740)	APBD Kabupaten
2145	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (Akses untuk semua)	Jumlah destinasi GSTC yang memiliki sarana dan prasarana wisata yang mengakomodasi keperluan penyandang disabilitas	Jumlah destinasi GSTC yang memiliki sarana dan prasarana wisata yang mengakomodasi keperluan penyandang disabilitas	5 destinasi	5 destinasi	809.200.000	674.977.750	(134.222.250)	APBD Kabupaten
2146	Peningkatan Pelayanan Kepariwisata	Jumlah destinasi wisata yang mengembangkan strategi peningkatan kepuasan	Jumlah destinasi wisata yang mengembangkan strategi	5 destinasi	5 destinasi	60.000.000	-	(60.000.000)	APBD Kabupaten

		pengunjung	peningkatan kepuasan pengunjung						
2147	Peningkatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	Jumlah SDM Pengelola Destinasi yang dibina	Jumlah SDM Pengelola Destinasi yang dibina	100 Orang	100 Orang	50.000.000	-	(50.000.000)	APBD Kabupa ten
2148	Analisa kepuasan wisatawan	jumlah dokumen pelaporan mengenai data kepu asan pengunjung kepa da publik yang disusun	Prosentase penyusunan dokumen pelaporan mengenai data kepuasan pengunjung kepada publik yang disusun	1 Dokumen	45%	55.000.000	4.625.000	(50.375.000)	APBD Kabupa ten
2149	Pembentukan Tim Koordinasi persiapan Penilaian GSTC-D	jumlah destinasi wisata yang dinilai oleh GSTC-D	jumlah destinasi wisata yang dinilai oleh GSTC-D	1 Dokumen	1 Destinasi	176.000.000	45.000.000	(131.000.000)	APBD Kabupa ten
2150	Penyusunan Peraturan Daerah Wisata	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah Yang dibuat	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah Yang dibuat	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	-	(50.000.000)	APBD Kabupa ten
2151	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan Rata- rata lama tinggal wisatawan nusantara dan		10%	10%	70.000.000	1.150.000	(68.850.000)	

		mancanegara							
2152	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri	Jumlah event promosi yang diikuti	Jumlah event promosi yang diikuti	3 Event	3 Event	70.000.000	1.150.000	(68.850.000)	APBD Kabupaten
2154	Program Pengembangan Kemitraan	Persentase peningkatan kerjasama pengembangan pariwisata		10%	10%	100.000.000	80.000.000	(20.000.000)	
2155	Pembinaan organisasi kepariwisataan	Jumlah organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pariwisata yang dibina	Jumlah organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pariwisata yang dibina	2 Organisasi	2 Organisasi	100.000.000	80.000.000	(20.000.000)	APBD Kabupaten
2156	Program Pengembangan Ekonomi Pariwisata	persentase masyarakat sekitar destinasi wisata yang memperoleh manfaat ekonomi dari pengembangan pariwisata		80%	80%	1.620.008.000	344.050.000	(1.275.958.000)	
2157	Pembinaan SDM Kepariwisataan	Jumlah pelaku pariwisata yang memperoleh	Jumlah pelaku pariwisata yang	50 Orang	15 orang	50.000.000	-	(50.000.000)	APBD Kabupaten

		pembinaan SDM kepariwisataan	memperoleh pembinaan SDM kepariwisataan						
2158	Peningkatan Kapasitas Bagi Para Pelaku Pariwisata (DAK Non Fisik)	Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata yang Mendapatkan Pelatihan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata yang Mendapatkan Pelatihan	400 Orang	130 orang	1.570.008.000	344.050.000	(1.225.958.000)	APBN/DAK
2159	Program pengembangan industri kreatif	persentase peningkatan jumlah wirausaha baru bidang ekonomi kreatif		30%	30%	105.000.000	36.117.500	(68.882.500)	
2160	Pembinaan pelaku usaha kreatif	jumlah pelaku usaha kreatif yang mendapat pembinaan	jumlah pelaku usaha kreatif yang mendapat pembinaan	25 Orang	15 orang	50.000.000	15.367.500	(34.632.500)	APBD Kabupaten
2161	pengembangan investasi industri kreatif	jumlah usaha kreatif yang mendapatkan fasilitas permodalan	jumlah usaha kreatif yang mendapatkan fasilitas permodalan	1 Usaha Kreatif	1 usaha kreatif	55.000.000	20.750.000	(34.250.000)	APBD Kabupaten
2162	URUSAN KEBUDAYAAN					2.031.800.000	758.398.800	(1.273.401.200)	
2163	Program Perlindungan Kebudayaan Lokal	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi		60%	60%	46.200.000	34.800.000	(11.400.000)	

2164	Pengembangan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu	Jumlah dokumen database objek pemajuan kebudayaan yang Termutakhirkan	Jumlah dokumen database objek pemajuan kebudayaan yang Termutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	46.200.000	34.800.000	(11.400.000)	APBD Kabupaten
2165	Program Pengembangan Kebudayaan Lokal	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan		50%	50%	119.400.000	125.318.800	5.918.800	
2166	Pengayaan keberagaman kebudayaan lokal	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang ditingkatkan pengayaannya	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang ditingkatkan pengayaan keberagamannya	1 Objek	1 Objek	60.000.000	114.758.800	54.758.800	APBD Kabupaten
2167	Kajian Kebudayaan lokal	jumlah dokumen kajian objek pemajuan kebudayaan	Jumlah dokumen kajian yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	59.400.000	10.560.000	(48.840.000)	APBD Kabupaten
2168	Program Pemanfaatan Kebudayaan Lokal	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan		70%	70%	1.866.200.000	598.280.000	(1.267.920.000)	
2169	Penguatan Identitas Kebudayaan Lokal	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang mempertahankan pakem	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang mempertahankan pakem	1 Objek	1 Objek	102.000.000	-	(102.000.000)	APBD Kabupaten

2170	Pengolahan Produk Budaya Lokal	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang diolah Menjadi Produk	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang diolah Menjadi Produk	1 Produk	1 Produk	204.000.000	-	(204.000.000)	APBD Kabupaten
2171	Internalisasi Nilai Budaya Lokal	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang diinternalisasi	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang diinternalisasi	1 Objek	1 Objek	102.000.000	-	(102.000.000)	APBD Kabupaten
2172	Pengembangan Inovasi Kebudayaan Lokal	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang terinovasi	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang terinovasi	1 Objek	1 objek	254.800.000	245.800.000	(9.000.000)	APBD Kabupaten
2173	Penyelenggaraan Event Budaya	Jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan	5.000.000	1.500.000 Orang	280.000.000	40.000.000	(240.000.000)	APBD Kabupaten
2174	Peningkatan kerjasama Kebudayaan	jumlah pihak yang menjalin kerjasama kebudayaan	jumlah pihak yang menjalin kerjasama kebudayaan	2 Pihak	2 Pihak	59.400.000	10.000.000	(49.400.000)	APBD Kabupaten
2175	Diplomasi Kebudayaan	Jumlah Diplomasi Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan	Jumlah Diplomasi Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan	10 Diplomasi	10 Diplomasi	765.000.000	302.480.000	(462.520.000)	APBD Kabupaten
2176	Kolaborasi Kebudayaan Lokal	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikolaborasikan	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikolaborasikan	3 Objek	3 Objek	99.000.000	-	(99.000.000)	APBD Kabupaten

BAB IV PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan merupakan pedoman untuk melaksanakan pengukuran kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran selama periode satu tahun. Pengukuran atas kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan merujuk kepada RKT Perubahan Tahun 2020. Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari telah tersusunnya RKT Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran berkewajiban melaksanakan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam RKT Perubahan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
2. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran harus melakukan pengendalian pelaksanaan rencana program/kegiatan melalui upaya perbaikan dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulanan
3. Pada akhir tahun 2020 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran berkewajiban menyampaikan laporan kinerja secara tertulis dalam bentuk Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).